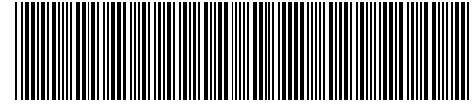




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.649029/2022**



DS:5013-8853-0734-8796

**Revisi ke 03**

Tanggal : 15 Februari 2022

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |            |   |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013)    | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  |
| 2. Unit Organisasi            | : (10)     | Badan Pembinaan Hukum Nasional  |
| 3. Provinsi                   | : (28)     | MALUKU UTARA  |
| 4. Kode>Nama Satker           | : (649029) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA  |
| Sebesar                       | : Rp.      | 1.199.068.000 ( SATU MILIAR SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA ENAM PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	1.199.068.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBPNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
			- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

- |                       |           |               |
|-----------------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN T E R N A T E | (062) Rp. | 1.199.068.000 |
|-----------------------|-----------|---------------|

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**  
**NOMOR : DIPA- 013.10.2.649029/2022**



DS:5013-8853-0734-8796

Satker : (649029) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	132.254.000
BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp.	132.254.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	1.066.814.000
BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp.	1.066.814.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.649029/2022  
I A. INFORMASI KINERJA**



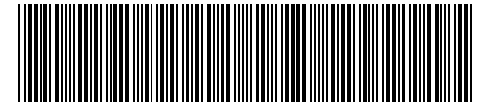
DS:5013-8853-0734-8796

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (28) MALUKU UTARA  
Kode>Nama Satker : (649029) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA

Halaman : I A. 1

Program	:	013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi				132.254.000
Kegiatan	:	5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah				132.254.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan		46.241.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan		46.241.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga		86.013.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah	1,00	Lembaga		86.013.000
Program	:	013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				1.066.814.000
Kegiatan	:	4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah				1.066.814.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
		2. 02	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
		3. 03	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum				
		4. 04	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah				
		5. 05	Persentase anggota JDH yang berpartisipasi aktif				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	7,00	Kelompok Masyarakat		160.000.000
Rincian Output	:	01 BDD.001	Fasilitasi Kelompok Desa Sadar hukum	5,00	Kelompok Masyarakat		60.000.000
		02 BDD.002	Layanan Penyuluhan Hukum	2,00	Kelompok Masyarakat		100.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.649029/2022  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5013-8853-0734-8796

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (28) MALUKU UTARA  
Kode>Nama Satker : (649029) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	2	:	4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		7,00	Lembaga	63.726.000
Rincian Output		:	01	BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	7,00	Lembaga	63.726.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4841.BMA	Data dan Informasi Publik		6,00	layanan	85.008.000
Rincian Output		:	01	BMA.001	Fasilitasi JDIHN	5,00	Lembaga	77.529.000
		:	02	BMA.002	Layanan Perpustakaan Hukum	1,00	Layanan	7.479.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		66,00	Orang	646.000.000
Rincian Output		:	01	QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)	66,00	Orang/Kasus	646.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		7,00	Kelompok Masyarakat	112.080.000
Rincian Output		:	01	QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)	7,00	Kegiatan	112.080.000

Jakarta, 17 November 2021  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

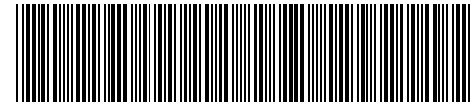
ttd.  
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum  
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**NOMOR : DIPA- 013.10.2.649029/2022**

**I B. SUMBER DANA**



DS:5013-8853-0734-8796

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Provinsi : (28) MALUKU UTARA  
 Kode>Nama Satker : (649029) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA

1. Anggaran Tahun 2022	Rp.	1.199.068.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	1.199.068.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

Pagu

Ekuivalen Rupiah

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.649029/2022  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5013-8853-0734-8796

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (28) MALUKU UTARA  
Kode>Nama Satker : (649029) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
649029	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	-	1.199.068	-	-	-	1.199.068		
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	132.254	-	-	-	132.254		
5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	-	132.254	-	-	-	132.254		
5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (28.51 MALUKU UTARA / KOTA TERNATE)	-	46.241	-	-	-	46.241	28 . 51	
01	RM	-	46.241	-	-	-	46.241	062	
5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (28.51 MALUKU UTARA / KOTA TERNATE)	-	86.013	-	-	-	86.013	28 . 51	
01	RM	-	86.013	-	-	-	86.013	062@	
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.066.814	-	-	-	1.066.814		
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	-	1.066.814	-	-	-	1.066.814		
4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (28.51 MALUKU UTARA / KOTA TERNATE)	-	160.000	-	-	-	160.000	28 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.649029/2022  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5013-8853-0734-8796

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (28) MALUKU UTARA  
Kode>Nama Satker : (649029) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA  
Kewenangan : (KD)

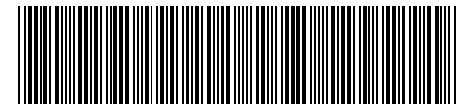
Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	160.000	-	-	-	160.000	062@	
4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (28.51 MALUKU UTARA / KOTA TERNATE)	-	63.726	-	-	-	63.726	28 . 51	
01 RM		-	63.726	-	-	-	63.726	062	
4841.BMA	Data dan Informasi Publik (28.51 MALUKU UTARA / KOTA TERNATE)	-	85.008	-	-	-	85.008	28 . 51	
01 RM		-	85.008	-	-	-	85.008	062	
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (28.51 MALUKU UTARA / KOTA TERNATE)	-	646.000	-	-	-	646.000	28 . 51	
01 RM		-	646.000	-	-	-	646.000	062@	
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (28.51 MALUKU UTARA / KOTA TERNATE)	-	112.080	-	-	-	112.080	28 . 51	
01 RM		-	112.080	-	-	-	112.080	062@	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>1.199.068</b>	-	-	-	<b>1.199.068</b>		

Jakarta, 17 November 2021  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum  
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.649029/2022  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:5013-8853-0734-8796

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : (28) MALUKU UTARA  
Kode>Nama Satker : (649029) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	649029	<b>KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	4.980	106.888	169.418	138.086	73.500	62.085	142.334	205.947	63.155	232.675	0	0	1.199.068
		<b>BELANJA BARANG</b>	4.980	106.888	169.418	138.086	73.500	62.085	142.334	205.947	63.155	232.675	0	0	1.199.068
	013.10.BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	4.980	0	15.129	34.698	3.000	2.085	27.447	34.915	8.000	2.000	0	0	132.254
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	4.980	0	15.129	34.698	3.000	2.085	27.447	34.915	8.000	2.000	0	0	132.254
	013.10.BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	0	106.888	154.289	103.388	70.500	60.000	114.887	171.032	55.155	230.675	0	0	1.066.814
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	106.888	154.289	103.388	70.500	60.000	114.887	171.032	55.155	230.675	0	0	1.066.814

Jakarta, 17 November 2021  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum  
NIP 197105011993031001



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.649029/2022  
IV A. B L O K I R**



DS:5013-8853-0734-8796

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : [28] MALUKU UTARA  
Kode dan Nama Satker : [649029] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA

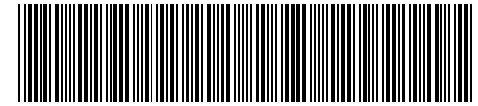
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
<b>649029</b>	<b>KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA</b>		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 282.703	<b>4841.QBA</b>	Disposisi: Automatic Adjustment <b>Layanan Bantuan Hukum Perseorangan</b>
	52 Belanja Barang Rp. 282.703	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 198.000 Automatic adjustment
<b>013.10.BB</b>	<b>Program Pembentukan Regulasi</b>		
<b>5256</b>	<b>Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah</b>	<b>4841.QBC</b>	Disposisi: Automatic Adjustment <b>Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat</b>
<b>5256.BDB</b>	<b>Fasilitas dan Pembinaan Lembaga</b>	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.850 Automatic Adjustment
	522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 765 Automatic Adjustment Disposisi: Automatic Adjustment		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 20.476 Automatic Adjustment Disposisi: Automatic Adjustment		
<b>013.10.BF</b>	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>		
<b>4841</b>	<b>Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah</b>		
<b>4841.BDD</b>	<b>Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat</b>		
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 916 Automatic adjustment Disposisi: Automatic Adjustment		
	522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.080 Automatic adjustment Disposisi: Automatic Adjustment		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.616 Automatic adjustment		

Jakarta, 17 November 2021  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum  
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 013.10.2.649029/2022  
IV B. C A T A T A N**



DS:5013-8853-0734-8796

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Provinsi : [28] MALUKU UTARA  
Kode dan Nama Satker : [649029] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.  
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum  
NIP 197105011993031001